Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 33917-33924

Keuangan Negara Sebagai Cerminan Prioritas Bangsa Dari Anggaran Hingga Realisasi

Ellisa Chandra Tio[1], Natasha Louisa[2], Syahla Atsylah Iskandar[3],Moody Rizqy Syahleindra[4]
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara
Corresponding Author: Ellisa Chandra Tio, e-mail: chandraellisa@gmail.com,

Published: December, 2025

ABSTRACT
Keuangan negara merupakan salah satu instrumen fundamental dalam menggerakkan roda pemerintahan sekaligus mencerminkan prioritas pembangunan suatu bangsa. Melalui proses perencanaan, penganggaran, hingga realisasi, keuangan negara menjadi medium yang memperlihatkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini membahas bagaimana pengelolaan keuangan negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena setiap alokasi anggaran mencerminkan pilihan strategis dalam menentukan sektor prioritas. Selain itu, realisasi anggaran sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan fiskal, potensi penyimpangan, hingga rendahnya efektivitas penyerapan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti keterkaitan antara anggaran dan realisasi sebagai indikator nyata transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keuangan negara tidak sekadar kumpulan angka dalam dokumen APBN, melainkan sebuah cermin yang memperlihatkan arah pembangunan, stabilitas fiskal, serta kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Anggaran, Realisasi, Transparansi, Akuntabilitas, Pembangunan.

ABSTRACT
The state finance system is a fundamental instrument in driving government functions while reflecting the development priorities of a nation. Through processes of planning, budgeting, and realization, state finance demonstrates the extent of the government's commitment to achieving public welfare. This article discusses how the management of state finance is not merely administrative but also political, as each budget allocation represents strategic choices in determining priority sectors. Moreover, budget realization often faces challenges such as fiscal limitations, potential irregularities, and low absorption effectiveness. Using a descriptive-analytical approach, this article highlights the interconnection between budgeting and realization as a concrete indicator of government transparency and accountability. The findings show that state finance is not just a collection of figures in the national budget (APBN) but a mirror that reflects the direction of development, fiscal stability, and the quality of governance in Indonesia.

Keywords: *State Finance, Budget, Realization, Transparency, Accountability, Development*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Keuangan negara merupakan salah satu aspek paling vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai instrumen utama dalam mendukung tercapainya tujuan bernegara, pengelolaan keuangan negara bukan sekadar aktivitas teknis dalam mencatat dan mengalokasikan dana, melainkan juga cerminan visi dan prioritas suatu bangsa. Melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah mengartikulasikan pilihan-pilihan strategis dalam pembangunan yang diharapkan dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan.

Oleh karena itu, keuangan negara tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya, karena setiap keputusan fiskal selalu berkaitan dengan arah pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Latar belakang pentingnya pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari posisinya sebagai alat distribusi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Dalam

konteks ini, penyusunan anggaran menjadi panggung politik fiskal di mana kepentingan pembangunan, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan sosial dikompromikan. Keuangan negara pada akhirnya bukan hanya sekumpulan angka yang tertulis dalam dokumen resmi, tetapi juga sebuah representasi dari skala prioritas bangsa yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial.

Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta diturunkan dalam berbagai peraturan perundang undangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keuangan negara dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan nasional. Anggaran yang disusun setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencerminkan arah kebijakan fiskal, yang pada gilirannya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan.

Namun, realisasi anggaran sering kali tidak berjalan seideal perencanaan, sehingga muncul tantangan dalam memastikan bahwa alokasi dana benar benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Keterkaitan antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan negara. Tingginya penyerapan anggaran tidak otomatis mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila tidak diiringi dengan kualitas belanja yang efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, rendahnya penyerapan anggaran dapat menimbulkan persoalan baru, seperti terhambatnya program prioritas, menurunnya kualitas pelayanan publik, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara perlu dilihat secara holistik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan dalam pengelolaan keuangan negara semakin kompleks. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu mengalokasikan anggaran secara efisien, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahap.

Isu-isu seperti korupsi, penyalahgunaan anggaran, hingga rendahnya akuntabilitas publik masih menjadi masalah klasik yang perlu diatasi dengan sistem pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, keuangan negara harus dikelola secara modern, transparan, dan akuntabel agar benar benar mencerminkan prioritas bangsa. Selain itu, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian turut memengaruhi stabilitas fiskal dalam negeri. Krisis keuangan, pandemi, dan fluktuasi harga komoditas internasional dapat berdampak langsung terhadap penerimaan dan pengeluaran negara.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran yang bijaksana agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Hal ini semakin mempertegas bahwa keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai alat respons kebijakan yang adaptif terhadap perubahan situasi.

Latar belakang lain yang menguatkan urgensi pengelolaan keuangan negara adalah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Masyarakat semakin kritis dalam menilai bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Ketidakpuasan publik sering kali muncul ketika ada kesenjangan antara perencanaan anggaran yang megah dengan realisasi yang minim dampak. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berorientasi pada hasil menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.

Keuangan negara juga memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi. Transparansi dalam penyusunan dan realisasi anggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam kerangka ini, partisipasi publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keuangan negara dapat menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah. Keterlibatan lembaga-lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga legislatif juga sangat menentukan kualitas tata kelola keuangan negara. Keberadaan lembaga-lembaga ini diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, efektivitas pengawasan masih sering terkendala oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta adanya kepentingan politik tertentu yang memengaruhi proses pengelolaan anggaran.

Keuangan negara yang dikelola dengan baik tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada peningkatan keadilan sosial. Anggaran yang dialokasikan untuk program-program

kesejahteraan masyarakat, subsidi, serta perlindungan sosial menjadi bukti nyata sejauh mana negara berpihak pada kelompok rentan. Dengan demikian, keuangan negara berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan negara menghadapi tantangan berupa adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Banyak program pembangunan yang dalam tahap perencanaan terlihat menjanjikan, tetapi dalam pelaksanaannya tidak memberikan hasil optimal. Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas birokrasi, serta adanya praktik penyalahgunaan anggaran. Akibatnya, keuangan negara yang seharusnya menjadi sarana pembangunan justru menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, masalah penyerapan anggaran yang rendah juga menjadi isu klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Banyak kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang tidak mampu merealisasikan anggaran sesuai target. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural maupun teknis dalam proses pelaksanaan anggaran. Rendahnya serapan anggaran berimplikasi pada tidak optimalnya pencapaian program, sehingga berdampak langsung terhadap masyarakat.

Isu lain yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan keuangan negara mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, Sustainable Development Goals (SDGs) menuntut adanya komitmen negara untuk mengalokasikan anggaran yang mendukung aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaan keuangan negara, karena pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang.

Keuangan negara juga memiliki fungsi stabilisasi dalam menghadapi dinamika ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menyeimbangkan kondisi perekonomian ketika terjadi inflasi, resesi, atau krisis lainnya. Dalam situasi tertentu, pemerintah harus berani mengambil kebijakan defisit anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang.

Dalam kerangka pembangunan nasional, keuangan negara juga berperan sebagai instrumen integrasi bangsa. Alokasi anggaran yang merata ke berbagai daerah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Namun, masih sering terjadi ketimpangan distribusi anggaran antara pusat dan daerah yang dapat memicu ketidakpuasan serta ketidakadilan fiskal. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal menjadi salah satu agenda penting untuk memperbaiki distribusi keuangan negara secara lebih adil.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka diperlukan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern, transparan, dan berorientasi hasil. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akuntabilitas melalui sistem e budgeting, e-audit, dan mekanisme pelaporan digital yang lebih cepat dan transparan.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. Keuangan negara bukan hanya sebuah instrumen administratif, tetapi juga cermin yang memperlihatkan prioritas suatu bangsa. Dari anggaran hingga realisasi, setiap rupiah yang dikelola negara mengandung makna politik, ekonomi, dan sosial yang luas.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara harus senantiasa diarahkan pada tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keuangan negara benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mencerminkan arah dan prioritas bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai bagaimana keuangan negara direncanakan, dianggarkan, hingga direalisasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan fakta, tetapi juga melihat hubungan antar unsur dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadikan anggaran sebagai refleksi prioritas bangsa. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menghadirkan gambaran yang utuh tentang fenomena yang sedang diteliti.

Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menelaah lebih dalam dinamika pengelolaan keuangan negara, termasuk tantangan dan peluang yang muncul dalam proses anggaran hingga realisasi. Analisis dilakukan untuk memahami makna di balik angka-angka dalam dokumen anggaran negara serta implikasinya terhadap pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menguraikan data secara naratif, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memahami secara mendalam makna, prinsip, dan dinamika yang terkandung dalam praktik pengelolaan keuangan negara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat keuangan negara bukan hanya sebagai angka-angka dalam laporan, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan yang sarat dengan nilai, prioritas, dan visi pembangunan bangsa.

Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal, maupun regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan karena kajian mengenai keuangan negara sangat erat kaitannya dengan landasan teoritis, kerangka hukum, serta kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai pandangan akademik dan praktis yang dapat memperkaya pemahaman tentang keuangan negara sebagai cermin prioritas bangsa. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), publikasi dari Kementerian Keuangan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Sumber data ini dipilih karena keuangan negara merupakan objek yang sangat erat kaitannya dengan regulasi, kebijakan, dan praktik administrasi yang terdokumentasi secara resmi. Dengan demikian, data yang digunakan memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan artikel jurnal, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas keuangan negara, transparansi fiskal, maupun kebijakan pembangunan. Sumber data sekunder tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan pendukung, tetapi juga sebagai landasan dalam menyusun analisis kritis. Dengan menggabungkan dokumen resmi dan literatur akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik yang dikaji.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, baik berupa dokumen hukum, laporan resmi, maupun publikasi ilmiah. Teknik ini dianggap paling relevan karena dapat memberikan informasi faktual mengenai bagaimana anggaran negara direncanakan dan direalisasikan. Selain mengkaji dokumen resmi, penelitian ini juga menggunakan referensi dari artikel ilmiah, jurnal internasional, serta literatur lain yang relevan untuk memperluas perspektif analisis. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi informasi dari berbagai sumber, sehingga analisis yang dilakukan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, studi dokumentasi menjadi landasan kuat dalam membangun argumentasi akademik penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objektif mengenai keuangan negara dalam konteks perencanaan dan realisasi anggaran.

Data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan tema yang relevan, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas belanja, serta tantangan pengelolaan keuangan negara. Dengan cara ini, peneliti dapat menyajikan gambaran faktual yang sesuai dengan fokus kajian. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan untuk menafsirkan makna di balik data yang telah dikumpulkan. Analisis ini tidak berhenti pada deskripsi semata, melainkan juga mengkaji implikasi kebijakan fiskal, efektivitas realisasi anggaran, dan keterkaitannya dengan kepercayaan publik. Melalui teknik ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keuangan negara berfungsi sebagai cermin prioritas bangsa. Penelitian ini difokuskan pada konteks keuangan negara.

Pemilihan Indonesia sebagai lokasi kajian didasarkan pada relevansi langsung dengan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan yang sedang berlangsung. Selain itu, keuangan negara Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi karena mencakup berbagai sektor pembangunan, desentralisasi fiskal,

serta dinamika hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai objek kajian yang kaya untuk dianalisis secara akademis.

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan memanfaatkan studi pustaka dan pengumpulan data sekunder. Periode penelitian disesuaikan dengan ketersediaan dokumen dan literatur terbaru yang berkaitan dengan keuangan negara, terutama APBN tahun berjalan serta laporan-laporan audit yang diterbitkan lembaga resmi. Dengan demikian, penelitian ini tetap relevan dengan dinamika terkini dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Keuangan Negara

Keuangan negara di Indonesia merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan

ketertiban dunia. Secara umum, keuangan negara diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun sebagai bentuk rencana fiskal pemerintah.APBN tidak hanya mencerminkan besaran angka-angka fiskal, tetapi juga merepresentasikan arah prioritas pembangunan nasional, sehingga dinamika anggaran mencerminkan pula dinamika sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Dalam konteks ini, keuangan negara dapat dipandang sebagai cermin kebijakan publik yang memproyeksikan kebutuhan masyarakat serta upaya negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

Selain itu, gambaran umum keuangan negara juga menegaskan keterkaitannya dengan siklus pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses penyusunan anggaran melibatkan berbagai aktor, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik.

Di sisi lain, realisasi anggaran menjadi bukti konkret bagaimana negara mengalokasikan sumber daya fiskalnya untuk bidang bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang keuangan negara tidak bisa dilepaskan dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran yang pada akhirnya akan menentukan sejauh mana tujuan nasional dapat diwujudkan.

Anggaran sebagai Instrumen Prioritas

Anggaran negara tidak sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran,melainkan menjadi instrumen penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Melalui anggaran, pemerintah dapat menegaskan komitmennya terhadap isu-isu strategis, misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggaran juga menjadi cerminan arah kebijakan politik pemerintah, di mana setiap alokasi mencerminkan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Dengan demikian, anggaran merupakan alat yang paling nyata dalam menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.

Namun, permasalahan sering muncul ketika anggaran yang disusun tidak sepenuhnya terealisasi sesuai rencana, baik karena keterbatasan kapasitas fiskal, hambatan birokrasi, maupun tantangan eksternal seperti krisis global. Dalam kondisi demikian, efektivitas anggaran dipertaruhkan, sebab alokasi yang ideal di atas kertas dapat berbeda dengan realisasi yang terjadi di lapangan.

Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah anggaran benar-benar menjadi instrumen prioritas atau sekadar dokumen formal yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rakyat. Evaluasi kritis terhadap hal ini perlu dilakukan agar fungsi anggaran sebagai cermin keuangan negara benar-benar dapat dioptimalkan.

Realisasi dan Tantangan Implementasi

Realisasi anggaran merupakan tahap paling krusial dalam siklus keuangan negara karena pada tahap inilah kebijakan fiskal benar-benar diwujudkan. Realisasi belanja negara tidak hanya menguji komitmen pemerintah dalam menjalankan program, tetapi juga mengukur kapasitas birokrasi dalam menyalurkan anggaran secara tepat sasaran.

Misalnya, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN harus benar-benar tersalurkan dalam bentuk peningkatan kualitas guru, pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Demikian pula, alokasi anggaran kesehatan harus dapat memastikan bahwa masyarakat memperoleh layanan yang layak dan merata. Dengan demikian, realisasi anggaran menjadi barometer utama dalam menilai efektivitas kebijakan keuangan negara.

Namun, tantangan besar sering muncul pada tahap implementasi. Masalah klasik seperti keterlambatan penyerapan anggaran, rendahnya kualitas perencanaan, hingga praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menghambat realisasi anggaran secara optimal. Selain itu, dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, krisis energi, maupun perubahan iklim dapat memengaruhi kemampuan negara dalam melaksanakan anggarannya. Oleh karena itu, strategi penguatan tata kelola keuangan negara menjadi sangat penting agar realisasi anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi formalitas dalam laporan tahunan.

Analisis Kebijakan dan Implikasi Sosial-Ekonomi

Dari perspektif analisis kebijakan, keuangan negara dapat dilihat sebagai sarana redistribusi sumber daya untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN mengandung implikasi langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, hingga pengurangan angka kemiskinan.

Misalnya, program bantuan sosial yang dibiayai dari anggaran negara dapat memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Demikian pula, investasi pemerintah dalam infrastruktur mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal.

Namun demikian, analisis juga menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang anggaran yang besar justru tidak sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga menimbulkan kritik terhadap efektivitas penggunaan keuangan negara.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal juga sering membuat pemerintah harus melakukan pembiayaan utang, yang dalam jangka panjang menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal nasional. Oleh karena itu, pembahasan keuangan negara tidak hanya sebatas pada jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana kebijakan fiskal tersebut diimplementasikan agar memberikan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai cermin dari arah kebijakan dan prioritas bangsa. Anggaran negara yang tertuang dalam APBN memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, keuangan negara mencerminkan sejauh mana visi pembangunan nasional diterjemahkan dalam bentuk alokasi dana yang konkret, terukur, dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya, realisasi anggaran menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Tantangan yang dihadapi, seperti keterlambatan penyerapan anggaran, lemahnya perencanaan, dan adanya penyimpangan dalam implementasi, menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealisme dalam dokumen anggaran dan kenyataan di lapangan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas agar anggaran benar-benar mampu memberikan manfaat nyata sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Selain itu, evaluasi atas pelaksanaan keuangan negara menunjukkan bahwa peran fiskal sangat erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi. Anggaran yang tepat sasaran mampu mengurangi kesenjangan, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, apabila keuangan negara tidak dikelola secara bijaksana, risiko yang muncul berupa beban utang, ketidakmerataan pembangunan, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan negara harus terus diukur dari dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan, bukan semata-mata dari sisi nominal alokasi anggaran.

REFERENSI

Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.

Arifin, M. Z., & SH, M. (2024). *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama.

Casas-Zamora, K. (2024). *Paying for democracy: political finance and state funding for parties*. ECPR Press.

Chakrabarty, T., & Vipra, T. (2023). State of State Finances. *PRS Legislative Research*. Enas, U., Moeljono, M., Zunaidi, A., Pribadi, Y., Syairozi, M. I., Uliansyah, B. A. A., ... & Sriyani, S. (2021). Keuangan Negara.

Firdaus, R. A., & Ifrochah, N. (2022). Pengaruh pengetahuan investasi dan motivasi investasi terhadap minat investasi mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN di pasar modal. *Jurnal Acitya Ardana*, *2*(1), 16-28.

Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(3), 112-128.

Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1), 378-385.

Kholiq, M. N., & Grigorius, E. S. (2021). Pengambilalihan Piutang Milik Terpidana Untuk Menggantikan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislatif*, 168-179.

Kurniawan, F., Alghazali, M. S. D., & Fadhila, A. (2022). Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(7), 565-588.

Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(8), 2928-2935.

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *8*(2), 174-182.

Najicha, F. U. (2022). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *6*(1), 169-181.

Nasir, C. (2024). Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For State Financial Management: Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, *1*(2), 1-25.

Nisak, K., & Riza, S. (2023). Pentingnya Trasparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korusi di Suatu Negara. Ameena Journal, 1(2), 223-231.

Putri, T. A., & Sitabuana, T. H. (2022). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Bumn). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(7), 1003-1018.

Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara*. umsu press.

Santoso, R., Zaharah, R., Taqwa, S. U., Dwilestari, I., & Hasanah, U. (2023). Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara. *Indonesian Journal of Religion Center*, *1*(1), 1-7. Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui

Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *MIZAN*, *9*(2), 273-290.

Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(6), 895-911.

Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL: Jurnal Pendidikan Universal*, *1*(2), 191-196.

Sianipar, G. A. E., & Ardini, L. (2023). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *jurnal sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, dan Investasi)*, *4*(1), 34-42.

Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, *25*(2), 182-201.

Sisworini, E., Zakaria, A., & Pahala, I. (2024). Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Auditorat Utama Keuangan Negara Iii Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia): Studi Kasus Pada Auditorat Utama Keuangan Negara Iii Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana*, *4*(1), 1-16.

Sudarmanto, K., Chairilian, M. A. C., & Sukarna, K. (2023). Rekonstruksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara. *Jurnal USM Law Review*, *6*(2), 825-840.